Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia

Windhu Putra*
Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of government spending - for building infrastructures, education and health - on economic growth and Indonesian community welfare that reside along the borderline during the period of 2007 to 2014. The data used in this research is panel data. Applying estimation model of Ordinary Least Square (OLS), this research indicates that government expenditures for infrastructures and education created significant effect on economic growth while the expenditure for healthcare did not significantly affect the economic growth. However, in the case of people welfare, government spending on infrastructure and economic growth showed a significant effect on it, but the government spending for education and healthcare had insignificant impact on human development index.

Keywords: *Government spending, economic growth, human development index, and border areas.*

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala pemerintahan di Indonesia dengan cara “one man one vote” sangat berpengaruh terhadap pola alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran akan terjadi ketempat dengan jumlah pemilih yang terbanyak.

Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia selama ini dirasakan memang belum terintegrasi dengan baik, dimana tiap Departemen cenderung berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing dan mengabaikan keterpaduan. Akibatnya, hasil pembangunan yang bisa dicapai juga di kabupaten perbatasan ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten perbatasan (Decentralization Support Facility, 2011). Pada dasarnya fungsi, tugas dan kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan memberikan

* Korespondensi: Windhu Putra, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. DR. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, Indonesia. Email: windhuputra83@gmail.com

pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Tetapi besarnya kewenangan yang dimiliki yang tidak didukung sistem teknologi dan pendidikan kebangsaan oleh pemerintah pusat membuat rentang kendali administrasi pemerintah menjadi lemah. Apalagi pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut semakin besar. Hal tersebut membuat kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia dengan wilayah perbatasan Sarawak Malaysia berpotensi menimbulkan hal-hal seperti *blank post area*, *illegal logging* dan *illegal entry* (Eilenberg, 2012). Hal ini berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah pada masyarakat perbatasan (Partnership for Governance Reform, 2011).

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas memberikan pelayanan publik ini, jelas perlu tersedia sejumlah dana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayainya (Curristine, Lonti, & Joumard, 2007). Ini berarti, sebagai langkah awal untuk menjalankan fungsi tersebut diperlukan dana anggaran dalam jumlah tertentu yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana dalam upaya menyelenggarakan pembangunan daerah.

Hasil penelitian Bastias (2010) menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Haryanto (2012) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan (Prasetyo & Firdaus, 2009) tentang pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia, menunjukkan tenaga kerja mempunyai nilai elastisitas yang terbesar yaitu sebesar 0,44 berikutnya listrik sebesar 0,33; panjang jalan sebesar 0,13; air bersih sebesar 0,04; stok modal sebesar 0,01 dan dummy krisis mempunyai koefisien negatif. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data panel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2012) melihat Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien positif dari belanja tidak langsung adalah 0.291399 yang berarti jika belanja tidak langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0.291399%. Koefisien positif dari belanja langsung sebesar 0.117470 yang berarti jika belanja langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,117470%. Belanja tidak langsung dan belanja langsung secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan model path, Baldwin & Borrelli (2008) menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara belanja pendidikan dan belanja infrastruktur jalan raya dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan pendapatan per kapita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja

pendidikan dan jalan raya menunjukkan hubungan yang positif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat masih sangat kecil. Kondisi ini disebabkan masih terdapat dominasi kepemilikan faktor-faktor produksi oleh pemilik modal atau konglomerat, dan ketimpangan disparitas pendapatan kabupaten/ kota. Ini berarti bahwa tidak setiap ada peningkatan pertumbuhan ekonomi (barang dan jasa) akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fatihudin, 2011).

Penelitian Wibowo (2014) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil estimasi, pengeluaran pemerintah sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Astri, Nikensari & Kuncara (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh pada IPM, namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM. Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Nurdyana, Budiono & Fahmi (2012), disimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah negatif dan signifikan pada level 1%. Besarnya marginal effect dari tingkat pendidikan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,90 persen. Peningkatan satu tahun umur sekolah kepala rumah tangga akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,90 persen.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan Kalbar; (2) untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan Kalbar.

2. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan merancang suatu model matematis yang menggambarkan hubungan antara satu variabel atau lebih. Model matematis yang dirancang ini harus mampu merepresentasikan hubungan kausal antara variabel yang dimunculkan dalam penelitian. Untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan dan untuk menguji hipotesis digunakan analisis Analisis Jalur (Path Analysis). Model analisis jalur pertama kali dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1918-1921 (Denis & Legerski, 2006). Analisis jalur digunakan untuk mengkaji hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar teori dan pengetahuan

yang relevan (Lleras, 2005). Ciri-ciri path analysis adalah (1) Landasan teorinya harus kuat, (2) Bentuk hubungan antar variabel bersifat linier, (3) Model struktural diwujudkan dalam bentuk persamaan rekursif, (4) Asumsi distribusi bersifat normal, (5) Model pengukuran di luar model yang digunakan, bisa berupa total skor atau rata-rata skor. Mengingat bahwa hubungan antar variabel penelitian yang bersifat linier, dan data yang digunakan dalam analisis adalah data panel yang terdiri dari data runtut waktu (time series) dan data cross section maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur, (Sarwono, 2010)

Selanjutnya, ditentukan variabel eksogen (variabel bebas) dan variabel endogen (variabel terikat), dilengkapi dengan arah panah sesuai dengan arah kausalitas. Arah panah yang lurus menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Apabila model pengukuran ini dimasukkan dalam diagram jalur, maka diperoleh diagram jalur. Seperti telah diilustrasikan pada tujuan penelitian pendahuluan dan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung, maka dirumuskan model struktural sebagai berikut.

Gambar 1. Diagram Jalur Model Struktural

Pengujian signifikansi koefisien pada setiap jalur adalah sama dengan uji koefisien regresi secara parsial yang menggunakan uji t. Untuk menginterpretasikan makna koefisien dalam analisis jalur harus dipenuhi persyaratan, yaitu koefisien jalur dianggap bermakna bila nilai probability value dari koefisien tersebut lebih kecil dari $\alpha=0,05$ (Sobolev & Kuramoto, 2010). Selanjutnya tingkat kebermaknaan koefisien dapat diteliti lagi pada pengaruh antar variabel, baik pengaruh langsung (*direct effect*) maupun pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dengan mencermati tingkat signifikansi antar variabel yang terkait. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis jalur yaitu terpenuhinya asumsi residual pada setiap model struktural. Pemeriksaan asumsi residual ini dilakukan melalui uji normalitas data yang dipakai dalam analisis (Sileshi, 2012). Setelah model teoritis yang dikembangkan dan dimanifestasikan dalam sebuah diagram jalur (*path diagram*) seperti tampak pada Gambar 1 selanjutnya dilakukan

konversi dalam bentuk persamaan matematis, sehingga terbentuk satu sistem persamaan simultan atau sering disebut model struktural, yaitu :

$$Y1 = f (Xi)..... (1)$$

Di mana, $i = 1,2,3$

dan persamaan strukturalnya :

$$Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X1 + \alpha_2 X2 + \alpha_3 X3 + \varepsilon_1 (2)$$

$$Y2 = f (Xi; Y1) (3)$$

maka persamaan strukturalnya :

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 Y1 + \varepsilon_2 (4)$$

Apabila persamaan 2 dan 4 dirangkum, maka persamaannya menjadi :

$$Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X1 + \alpha_2 X2 + \alpha_3 X3 + \varepsilon_1 (5)$$

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 Y1 + \varepsilon_2 (6)$$

Di mana,

$X1$ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur (PPBI)

$X2$ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP)

$X3$ = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK)

$Y1$ = Pertumbuhan Ekonomi (PE)

$Y2$ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ε = error term

α, β = koefisien jalur

Setelah diperoleh koefisien dari variabel yang diestimasi, maka langkah selanjutnya ialah menguji parameter hasil estimasi tersebut yaitu berupa pengujian koefisien determinasi, uji-t, dan uji-F. Nilai R^2 mencerminkan seberapa besar kontribusi atau pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM. Semakin besar nilai R^2 maka makin besar kontribusi variabel dependen, dalam menjelaskan variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas (Zvizdojević & Vukotić, 2015). Jika nilai F_{hit} > F_{tabel} maka ketiga variabel bebas (pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat (pertumbuhan ekonomi dan IPM), dan begitu pula sebaliknya.

$$F_{hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R)/(N-k)} (7)$$

Di mana,

R^2 = koefisien determinasi

N = jumlah pengamatan/sampel

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

Pengambilan keputusan diambil pada tingkat signifikan (α) = 5% dengan pengujian sebagai berikut. (1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM). (2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas, (Peters, 2001). Dalam penelitian ini variabel bebas diwakili oleh variabel pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur (X1), pendidikan (X2) dan kesehatan (X3) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas diwakili oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana pengujian tersebut akan menggunakan rumus nilai t hitung sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)} \dots \dots \dots (8)$$

Di mana,

β_i = koefisien regresi

se = standar error

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel : Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya masing-masing variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM.

3. PEMBAHASAN

Di seluruh Kabupaten Perbatasan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, dapat dikatakan bahwa nilai nominal maupun riil dari total pengeluaran pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah tersebut

bisa dilihat dari besarnya belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk barang dan jasa. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah riil dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan makin berkualitas memang sangat diperlukan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara optimal, dan dapat menjamin tercapainya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata. Semua pihak sependapat bahwa daerah perbatasan dapat dikatakan sebagai cerminan kondisi riil bangsa dan negara Indonesia, hal ini karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Sampai saat ini, kawasan perbatasan yang meliputi 5 kabupaten memang dapat dikatakan sebagai kawasan yang masih terbelakang dan mendapatkan porsi pembangunan yang sangat kecil. Padahal kelima Kabupaten Perbatasan ini memiliki wilayah administrasi yang sangat luas. Jaringan infrastruktur dalam wilayah 5 Kabupaten Perbatasan ini juga masih sangat kurang memadai dan masih perlu terus dikembangkan. Badan jalan yang dibangun dari Kecamatan Paloh menuju Putussibau dan menghubungkan kelima Kabupaten Perbatasan ini masih baru dimulai dalam tahap pembangunan awal dan tahap pengerasan. Data mengenai pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur Di Kabupaten Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten				
	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu
2007	97,796.81	56,964.85	85,157.56	129,284.27	162,809.65
2008	162,290.60	181,858.88	137,515.46	281,553.59	176,099.38
2009	133,936.61	23,479.84	118,566.66	81,610.89	187,186.00
2010	133,602.43	22,260.12	79,024.41	82,525.42	196,832.28
2011	138,631.00	66,978.00	76,170.00	97,116.00	205,176.23
2012	132,123.00	35,074.00	117,560.00	116,082.00	189,743.00
2013	150,557.00	95,136.00	162,679.00	162,956.00	267,204.00
2014	209,791.13	179,060.20	207,931.66	137,839.34	245,122.69

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), kemenkeu.go.id (2015)

Pengeluaran pemerintah berupa dana investasi untuk pembangunan bidang sosial yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia yang tidak bisa dilihat secara langsung perkembangannya adalah untuk bidang pendidikan. Output dari investasi ini sebagian bisa dilihat bentuk fisiknya berupa gedung-gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendukungnya, tetapi tingkat perkembangan yang dicapai anak didik dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya memang tidak bisa dilihat bentuk fisiknya.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat fundamental bagi perkembangan sebuah negara. Banyak ahli mengemukakan bahwa bidang pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di suatu negara (Kest,

2005). Sehubungan dengan hal itu, maka sudah seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun bidang pendidikan tersebut bisa dilihat dari total anggaran pengeluaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan pendidikan. Data mengenai pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, bisa dilihat dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Di Kabupaten Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat (dalam juta rupiah)

Tahun	Kabupaten				
	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu
2007	183,993.52	84,335.52	147,804.32	155,094.94	42,631.41
2008	77,593.96	192,436.43	176,748.36	125,458.83	86,367.65
2009	285,308.52	12,509.94	202,462.23	86,883.89	157,668.04
2010	320,504.38	153,653.34	248,401.02	216,498.34	196,037.81
2011	363,788.00	175,975.00	302,504.00	278,470.00	248,743.00
2012	414,375.00	200,056.00	368,940.00	333,749.00	278,911.00
2013	469,553.00	248,169.00	362,823.00	286,506.00	242,099.00
2014	552,533.28	238,137.03	388,357.65	303,990.09	262,475.62

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), kemenkeu.go.id (2015)

Bidang lain yang membutuhkan dana investasi dalam jumlah yang cukup besar adalah bidang kesehatan. Output investasi pada bidang ini ada dua kategori, yaitu pertama, adalah output yang bisa dilihat secara langsung berupa ketersediaan rumah sakit, puskesmas, dan polindes serta penyediaan berbagai fasilitas pendukungnya, dan kedua, adalah output yang tidak bisa dilihat kondisi fisikanya berupa tingkat kesehatan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi manfaat positif bagi meningkatnya angka harapan hidup, (Sharpe, Bradley, & Messinger, 2007). Bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Data mengenai pengeluaran bidang kesehatan ini dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pengeluaran Pemerinrtah Bidang Kesehatan Di Kabupaten Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat (dalam juta rupiah)

Tahun	Kabupaten				
	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu
2007	97,796.81	56,964.85	85,157.56	129,284.27	162,809.65
2008	79,309.60	56,527.40	83,491.31	101,433.71	56,252.90
2009	56,729.47	160,749.03	237,376.66	77,667.78	24,933.76
2010	64,800.96	44,613.90	71,393.63	80,500.90	51,817.90
2011	77,933.00	53,602.00	76,416.00	89,776.00	63,784.00
2012	96,846.00	52,507.00	81,139.00	95,858.00	70,223.00
2013	107,522.00	74,178.00	87,332.00	121,865.00	79,826.00
2014	120,529.08	77,315.62	114,526.99	152,403.99	86,128.61

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan (DJPK), kemenkeu.go.id (2015)

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kalimantan Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas ekonomi produktif di Kabupaten Perbatasan terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberi kontribusi yang semakin besar terhadap nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB) pada masing-masing Kabupaten Perbatasan. Data mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Perbatasan dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2010 s.d 2014 (Dalam Persen)

Tahun	Kabupaten				
	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu
2007	5.38	6.12	5.48	5.16	3.42
2008	5.51	5.57	3.49	4.7	3.55
2009	5.43	4.5	4.95	5.38	3.7
2010	5.88	4.63	4.15	5.21	4.44
2011	5.75	5.65	4.61	5.49	4.56
2012	5.78	5.71	4.92	5.51	4.63
2013	5.81	5.79	5.01	5.53	4.72
2014	5.88	5.81	5.04	5.55	4.81
Rata-rata	5.58	5.09	5.01	4.77	4.65

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (2015)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi pada 5 Kabupaten Perbatasan terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir. Terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa nilai product domestic regional bruto (PDRB) pada 5 Kabupaten Perbatasan terus meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi di 5 Kabupaten Perbatasan yang berada di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas. Sedangkan, kabupaten yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Mengingat infrastruktur yang tersedia pada Kabupaten Perbatasan masih sangat terbatas, maka tantangan berat yang dihadapi pemerintah Kabupaten Perbatasan ialah membangun landasan ekonomi daerah perbatasan yang semakin kuat, menumbuhkan kembangkan berbagai aktivitas ekonomi yang potensial untuk dikembangkan, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ada pemikiran yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Khan & Bashar,

2015). Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat indeks pembangunan manusia. Salah satu dari tiga indikator indeks pembangunan manusia adalah pendapatan per kapita riil (Khodabakhshi, 2011). Ini berarti bahwa makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, maka akan makin tinggi pula pendapatan per kapita riil, dengan asumsi bahwa jumlah penduduk dianggap konstan (Gallup, Radelet, & Warner, 1998). Selanjutnya, dalam model pembangunan modern sekarang ini, aspek sumber daya manusia harus dilihat sebagai agen perubahan dalam pembangunan atau sebagai subyek (pelaku) dari pembangunan itu sendiri (Tuomi, 2005). Ini berarti, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah, maka dari itu pendekatan kebutuhan dasar yang terfokus pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup manusia menjadi sangat penting. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, maka angkatan kerja di daerah tersebut akan semakin produktif, dan semakin tinggi pula peluang untuk menciptakan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu faktor yang diperkirakan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif masih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada tahun 2014 masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 29 dari 33 provinsi dengan nilai 64,89. Angka IPM ini ternyata mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka IPM tahun 2013 yang mencapai angka 70,93. Data mengenai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Perbatasan dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Perbatasan Tahun 2007-2014 (Dalam Persen)

Tahun	Kabupaten				
	Sambas	Bengkayang	Sanggau	Sintang	Kapuas Hulu
2007	63.01	66.32	67.64	66.89	69.26
2008	63.73	66.81	67.86	67.44	69.41
2009	64.36	67.18	68.20	68.00	69.85
2010	64.93	67.55	68.55	68.31	70.03
2011	65.80	67.98	68.97	68.77	70.38
2012	66.19	68.50	69.50	69.14	70.52
2013	66.81	69.38	70.30	69.81	70.97
2014	63.28	64.40	62.06	63.19	62.90
Rata-rata	64.76	67.27	67.89	67.69	69.17

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (2015)

Dari data yang ditampilkan pada Tabel 5 diatas bisa dilihat bahwa angka IPM dari lima kabupaten perbatasan rata-rata mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan angka IPM yang bisa dicapai pada tahun 2010 sd. 2014. Angka IPM rata-rata tertinggi yang bisa dicapai oleh Kabupaten Kapuas Hulu ialah 69,17. Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten perbatasan masih perlu terus membenahi pelayanan publik pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Lebih jauh, pemerintah daerah kabupaten perbatasan juga harus bekerja keras mendorong seluruh

perangkat daerah untuk memacu pembangunan ekonomi dengan fokus meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sector-sektor ekonomi produktif yang ada dimasing-masing daerah.

Dari hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*) menunjukkan bahwa variabel endogen indeks pembangunan manusia (IPM atau Y2) dipengaruhi oleh variabel eksogen pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur (PPBI atau X1), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PPBP atau X2), dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (PPBK atau X3), serta variabel endogen-intervening pertumbuhan ekonomi (PE atau Y1), yang diinterpretasikan masing-masing melalui koefisien jalur. Koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yang kemudian dinyatakan dalam dua model persamaan, yaitu

$$Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X1 + \alpha_2 X2 + \alpha_3 X3 + \epsilon_1 \dots\dots\dots (9)$$

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 Y1 + \epsilon_2 \dots\dots\dots (10)$$

Nilai koefisien jalur tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	4.927	.368	13.403	.000
PPBI	3.732	.000	2.220	.033
PPBP	2.956	.000	3.293	.002
PPBK	-3.544	.000	0.136	.893

a. Dependent Variable: PE

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	27.531	3.192	24.289	.000
PPBI	1.812	.000	2.071	.021
PPBP	.493	.000	.242	.180
PPBK	.586	.000	1.171	.250
PE	1.669	.591	.485	2.822

a. Dependent Variable: PE

Berdasarkan hasil analisis pada kedua tabel di atas, dapat dibentuk persamaan regresi model struktural sebagai berikut:

$$\text{Model Struktural 1: } Y1 = 4,927 + 3,732 X1 + 2,956 X2 - 3,544X3 + \epsilon_1 \dots\dots\dots (11)$$

$$\text{Model Struktural 2: } Y2 = 27,531 + 1,812 X1 + 0,493 X2 + 0,586X3 + 1,669Y1 + \epsilon_2 \dots (12)$$

Sehingga dapat ditampilkan koefisien jalur yang diperoleh dari hasil perhitungan data adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Koefisien Jalur Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	T	Probability Value	Keterangan
PPBI (X1) → PE (Y1)	3,732	2.220	0.033	Signifikan
PPBP (X2) → PE (Y1)	2,956	3.293	0.002	Signifikan
PPBK (X3) → PE (Y1)	-3,544	-0.136	-0.893	Tidak signifikan
PPBI (X1) → IPM (Y2)	1,812	2.071	0.021	Signifikan
PPBP (X2) → IPM (Y2)	0,493	0,242	0.180	Tidak signifikan
PPBK (X3) → IPM (Y2)	0,586	1.171	0.250	Tidak signifikan
PE (Y1) → IPM (Y2)	1,669	2,822	0.008	Signifikan

Keterangan:

PPBI = Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur

PPBP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

PPBK = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data pada Tabel 8 selanjutnya dapat ditafsirkan besarnya pengaruh atau tingkat keeratan pengaruh serta arah hubungan antar variabel yang diajukan dalam penelitian ini yang dimanifestasikan oleh nilai koefisien jalur pada masing-masing jalur sebagai berikut. Variabel PPBI berpengaruh signifikan terhadap PE, yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 3,732 dengan probability value sebesar 0,033 ternyata lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti, PPBI berpengaruh signifikan terhadap PE. Dapat juga dikatakan PPBI berpengaruh cukup besar terhadap PE. Koefisien jalur yang bertanda positif ini menunjukkan bentuk hubungan yang searah. Artinya, naiknya PPBI sebesar 1%, akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PE sebesar 3,732%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kesatu yang dimunculkan dalam penelitian ini terbukti benar atau dapat diterima.

Variabel PPBP berpengaruh signifikan terhadap PE. Hal ini ditunjukkan dari koefisien jalur sebesar 2,956 dengan probability value sebesar 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha=0,05$). Ini berarti PPBP berpengaruh signifikan terhadap PE sebesar 2,956, dengan bentuk hubungan yang searah. Dengan perkataan lain, variabel PPBP dapat meningkatkan nilai tambah pada PDRB yang cukup berarti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalbar. Artinya, naiknya PPBP sebesar 1%, akan memberi kontribusi terhadap PE sebesar 2,956%. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis kedua yang dimunculkan dalam penelitian terbukti benar atau dapat diterima.

Variabel PPBK berpengaruh tidak signifikan terhadap PE. Hal ini ditunjukkan dari koefisien jalur sebesar -3,544 dengan probability value sebesar 0,893 yang lebih

besar dari taraf signifikansi ($\alpha=0,05$). Dengan perkataan lain, variabel PPBK akan mengurangi nilai tambah pada PDRB atau menurunkan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalbar. Artinya, menurunnya PPBK sebesar 1%, akan mengurangi PE sebesar 3,544%. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis ketiga yang dimunculkan dalam penelitian ini terbukti tidak benar atau ditolak.

Variabel PPBI berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 1,812 dengan probability value sebesar 0,021 yang ternyata lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Koefisien jalur positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya setiap kenaikan PPBI sebesar 1% niscaya akan meningkatkan IPM sebesar 1,812 di kabupaten perbatasan. Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa PPBI berpengaruh cukup besar terhadap IPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian terbukti benar atau dapat diterima.

Variabel PPBP berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,493 dengan probability value sebesar 0,180 yang lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Ini berarti, variabel PPBP berpengaruh sangat kecil terhadap variabel IPM, dengan bentuk hubungan yang searah. Dari hasil uji hipotesis ini dapat dikemukakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh sangat kecil terhadap IPM di kabupaten perbatasan Provinsi Kalbar. Artinya, naiknya PPBP sebesar 1%, akan menaikkan IPM sebesar 0,493%. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima yang dirumuskan dalam penelitian terbukti tidak benar atau ditolak.

PPBK berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,586 dengan probability value sebesar 0,250 yang lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Ini berarti, variabel PPBK berpengaruh sangat kecil terhadap variabel IPM, dengan bentuk hubungan yang searah. Dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh sangat kecil terhadap IPM. Artinya, naiknya PPBK sebesar 1%, akan menaikkan IPM sebesar 0,586%. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam yang dirumuskan dalam penelitian terbukti tidak benar atau ditolak.

PE berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini dimanifestasikan dari koefisien jalur sebesar 1,669 dengan probability value sebesar 0,008 yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini berarti variabel PE berpengaruh cukup besar terhadap variabel IPM sebesar 1,669, dengan bentuk hubungan yang searah. Artinya, naiknya PE sebesar 1%, akan menaikkan IPM sebesar 1,669%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh yang dirumuskan dalam penelitian terbukti benar atau dapat diterima.

Analisis jalur ialah suatu metode analisis yang melibatkan banyak variabel dan banyak jalur. Variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini terdiri atas variabel

eksogen, variabel endogen intervening, dan variabel endogen dependen. Oleh karena itu, dalam analisis jalur bisa juga diidentifikasi pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan pengaruh total (*total effect*) (Obeng, 1988). Berikut ini akan dibahas masing-masing pengaruh tersebut. Hasil perhitungan dari pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dimuat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Variabel Eksogen		Variabel Endogen		Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
		PE	IPM		
PPBI	L	-	1,812	-	
	TL	3,732	1,669	$3,732 \times 1,669 = 6,2287$	$1,812 + 6,2287 = 8,0407$
PPBP	L	-	0,493		
	TL	2,956	1,669	$2,956 \times 1,669 = 4,9336$	$0,493 + 4,9336 = 5,4266$
PPBK	L		0,586		
	TL	-3,544	1,669	$-3,544 \times 1,669 = -5,9517$	$0,586 + (-5,9517) = -5,3657$

Keterangan:

L = langsung

TL = tidak langsung

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*) pada bagian ini mengidentifikasi pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intervening. Analisis jalur dalam model ini ada tiga jalur, yaitu: pertama, koefisien jalur pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi, yaitu jalur dari PPBI ke IPM, melalui PE, yang kedua, koefisien jalur pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi, yaitu jalur dari PPBP ke IPM, melalui PE, dan ketiga, koefisien jalur pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi, yaitu jalur dari PPBK ke IPM, melalui PE,

Dari data yang ditampilkan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur melalui variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung sebesar 6,2287 terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Dari hasil analisis dengan persamaan regresi model 2 dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang positif dan relatif cukup besar terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Pengaruh ganda ini diwujudkan dalam bentuk meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah perbatasan sebagai dampak dari semakin baiknya kondisi infrastruktur. Disamping itu, intensitas mobilitas orang dan barang juga akan semakin tinggi (Olufemi, Olatunbosun, & Adeniran, 2013). Meningkatkan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur selain menciptakan banyak peluang untuk tumbuh kembangnya berbagai jenis aktivitas ekonomi produktif,

sehingga bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, juga pada saat yang bersamaan sekaligus ikut meningkatkan indeks pembangunan manusia (Suescún, 2007) .

Demikian pula variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) melalui variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung sebesar 4,9336 terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Angka ini menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang positif dan relatif cukup besar terhadap angka indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan. Pengaruh ganda ini dimanifestasikan dalam bentuk semakin baiknya kualitas sumber daya manusia di daerah ini, karena cukup banyak anak usia sekolah yang bisa menikmati pendidikan sebagai dampak dari tersedianya gedung-gedung sekolah pada semua jenjang pendidikan, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di daerah ini. Pada saat yang sama, terus tumbuh kembangnya berbagai aktivitas ekonomi produktif di sektor industri dan jasa yang sudah tentu akan menciptakan kesempatan kerja. Apabila tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor ekonomi produktif tersebut semakin berkualitas, maka dengan sendirinya tingkat produktivitas sektor tersebut juga akan meningkat, (Menon, 2010), dan juga bisa memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, serta sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, (Jajri & Ismail, 2010).

Sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung sebesar -5,9517 terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memberikan pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang negatif dan relatif cukup besar terhadap angka indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan. Pengaruh ganda ini ditunjukkan dalam bentuk kurang memadainya tenaga para medis seperti perawat dan bidan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di kawasan perbatasan, dan kemudian mendorong masyarakat untuk berobat kepada dukun yang ada di desa atau dusun tersebut. Bertambahnya jumlah puskesmas, pula pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tidak dibarengi dengan penyediaan tenaga pelayanan bidang kesehatan dalam jumlah yang memadai, menyebabkan banyak tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu dan pos persalinan desa (polindes) yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan katalain, banyak Polindes yang dibangun tetapi tidak memiliki tenaga bidan, sehingga pelayanan kepada ibu-ibu hamil tidak bisa dilaksanakan seperti yang diharapkan. Kegiatan pelayanan kepada ibu-ibu hamil baru diberikan apabila ada tenaga bidan bertugas di Polindes tersebut, Intensitas pelayanan tersebut sangat tidak memadai, karena hanya dilakukan 3-4 kali kunjungan dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan tempat pelayanan kesehatan itu berada jauh dari pemukiman penduduk. Kondisi seperti ini pada akhirnya mengakibatkan masyarakat di kawasan perbatasan lebih memilih berobat menggunakan tenaga dukun yang ada dekat dengan tempat pemukimannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, selanjutnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. (1) Variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini berarti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (2) Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini bermakna bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (3) Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (4) Variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan kontribusi terhadap naiknya IPM kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (5) Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pada indeks pembangunan manusia kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (6) Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan arah hubungan yang tidak searah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan memberikan kontribusi terhadap turunnya indeks pembangunan manusia kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (7) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan arah

hubungan yang tidak searah. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan terhadap IPM di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (8) Variabel pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat selama periode dari tahun 2007-2014. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan menyebabkan naiknya indeks pembangunan manusia di kabupaten perbatasan.

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan diatas, maka disarankan (1) Pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan, karena daerah perbatasan menjadi cerminan kondisi masyarakat bangsa dan Negara Indonesia dimata luar negeri. Selain itu, daerah perbatasan juga memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Perhatian pemerintah daerah hendaknya tidak hanya meningkatkan anggaran, tetapi juga pengalokasian anggaran pembangunan tersebut dengan prioritas pendistribusian yang adil dan merata pada semua kabupaten perbatasan terutama anggaran untuk bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan bisa lebih dioptimalkan. (2) Diharapkan pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan iklim investasi dengan memberikan insentif khusus kepada investor yang berhubungan secara langsung dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga bisa bekerja secara lebih produktif, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan sekaligus pula untuk mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah perbatasan. (3) Bagi pemerintah daerah hendaknya dapat mengalokasikan dan mengelola anggaran pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di daerah perbatasan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan sehingga pengeluaran tersebut diarahkan secara tepat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 77-102.
- Baldwin, N., & Borrelli, S. A. (2008). Education and economic growth in the United States: cross-national applications for an intra-national path analysis. *Policy Science*, 41(3), 183-204.

- Bastias, D. D. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Curristine, T., Lonti, Z., & Joumard, I. (2007). Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities. *OECD Journal on Budgeting*, 7(1), 1-41.
- Decentralization Support Facility. (November 2011). *Naskah Kebijakan Pelaksanaan Perbatasan Secara Terpadu*.
- Denis, D. J., & Legerski, J. (2006). Causal Modeling and the Origins of Path Analysis. *the Annual Convention of the American Psychological Association* (p. 2). Toronto, CANADA.: ICAAP.
- Eilenberg, M. (2012, Mei). *At The Edges of States: Dynamics of state formation in the Indonesian borderlands*. Leiden: KITLV Press.
- Fatihudin, D. (2011). *Pengaruh Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Program Pascasarjana University Eirlangga.
- Gallup, J. L., Radelet, S., & Warner, A. (1998). *Economic Growth and the Income of the Poor*. Harvard Institute for International Development.
- Haryanto, T. P. (2012.). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Jajri, I., & Ismail, R. (2010). Impact of labour quality on labour productivity and economic growth. *African Journal of Business Management*, 4(4), 486-495.
- Kest, R. (2005). Principles Of Human Development: Human Development, Education And Economic Development. *Futurics*, 29(1&2), 50-66.
- Khan, H., & Bashar, O. (2015). Social Expenditure And Economic Growth: Evidence From Australia And New Zealand Using Cointegration And Causality Tests. *The Journal of Developing Areas*, 49(4), 285-300.
- Khodabakhshi , A. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(3), 251-253.
- Lleras, C. (2005). Path Analysis. In K. Kempf-Leonard, *Encyclopedia of Social Measurement* (pp. 25-30). Amsterdam: Elsevier .
- Menon , M. E. (2010). The Link Between Education And Productivity: The Employers' Perspective . *International Conference On Applied Economics – ICOAE* , (pp. 523-528).

- Nurdyana S., H., Budiono, & Fahmi, M. (2012). *Pendidikan dan Kemiskinan (Studi Kasus di Maluku Utara)*. Bandung: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Obeng, K. (1988). Application of path analysis methodology to transit system maintenance performance. *Transportation*, 15(4), 297–316.
- Olufemi, E. A., Olatunbosun, A. J., & Adeniran, I. G. (2013). Infrastructural Development And Its Effect on Economic Growth: The Nigerian Perspective. *European Scientific Journal*, 9(31), 431-452.
- Partnership for Governance Reform. (2011). *Partnership Policy Paper No. 2/2011: Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Partnership for Governance Reform.
- Peters, C. (2001). Statistics for Analysis of Experimental Data. In C. A. Peters, *Statistics for Analysis of Experimental Data* (pp. 1-25). Princeton: AEESP, Champaign, IL.
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Sarwono, J. (2010). *Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian dan Aplikasi*. Retrieved from <http://www.jonathansarwono.info>
- Sharpe, A., Bradley, C., & Messinger, H. (2007). *The Measurement of Output and Productivity in the Health Care Sector in Canada: An Overview (CSLS Research Reports 2007-06)*. Retrieved from Centre for the Study of Living Standards.: <<https://ideas.repec.org/p/sls/resrep/0706.html>>
- Sileshi, G. W. (2012). A critique of current trends in the statistical analysis of seed germination and viability data. *Seed Science Research*, 22(3), 145-159.
- Sobolev, B., & Kuramoto, L. (2010). Cluster-randomized design for simulation-based evaluation of complex healthcare interventions. *Journal of Simulation*, 4(1), 24-33.
- Suescún, R. (2007). *The Role of Fiscal Policy in Human Development and Growth*. Retrieved from The World Bank Documents and Reports: <http://documents.worldbank.org/curated/en/803941468180251387/pdf/784990WP0Fisca00Box377344B00PUBLIC0.pdf>
- Tuomi, M. T. (2005). Agents of social change in education. *Community Development Journal*, 40(2), 205-211.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Zvizdojević, J., & Vukotić, M. (2015). Application Of Statistical Methods In Analysis Of Agriculture - Correlation And Regression Analysis. *The Journal "Agriculture & Forestry" (Časopis "Poljoprivreda i šumarstvo")*, 61(1), 309-324.